

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Presiden Filipina terpilih, Rodrigo “Rody” Roa Duterte secara resmi memenangkan Pemilihan Umum Presiden Filipina pada 9 Mei 2016 lalu. Kehadiran sosok Rodrigo Duterte tidak bisa lepas dari segala kontroversi yang ia timbulkan akibat beberapa perilaku dan pernyataan yang ia buat kepada publik, terutama soal pemberantasan peredaran Narkoba di Filipina. Sejak masa kampanyenya, Duterte mendapat julukan “*The Punisher*” atas janji-janjinya soal memberantas Narkoba di Filipina dan pelaku aksi kriminal lainnya apabila terpilih. (Aljazeera, 2016). Ia kerap kali mengatakan akan menangkap dan bahkan membunuh para Bandar narkoba demi membersihkan Filipina dari barang terlarang tersebut. Pada pidato pertamanya dalam *State of the National Address* (SONA), 25 Juli 2016 lalu, Duterte mengatakan, “*There will be no let-up in this campaign. Double your efforts. Triple them, if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish.*” Di setiap pidatonya, Duterte selalu menegaskan tujuannya untuk membersihkan Filipina dari sarang narkoba, dengan menggerakkan tenaga kepolisian dan militer negara.

Ia membuktikan niatnya dalam memberantas Narkoba bukan sekedar janji kampanye belaka dengan dikeluarkannya *Philippine National Police* (PNP) *Anti-*

Illegal Drugs Campaign Plan Project: Double Barrel atau disebut *Operation Plan (Oplan) Double Barrel* oleh Kepolisian Nasional Filipina. *Oplan Double Barrel* secara resmi diluncurkan pada 1 Juli 2016, dengan tujuan utama memberantas tuntas Narkoba dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinan Duterte (PNP, Additional Policies and Guidelines on the Conduct of PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan: "Double Barrel", 2016). Adanya program ini membuat pemerintah melalui aparat kepolisian dan militer memiliki wewenang lebih dalam menangkap bandar Narkoba. Program ini menjadi kontroversi di kancah internasional karena dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian mengeksekusi mati bandar dan pecandu Narkoba di tempat. Setiap harinya, masyarakat Filipina mendapat kabar ditemukannya korban tewas yang ternyata seorang pengedar maupun pengguna Narkoba di tempat-tempat umum. Sejak kemenangannya, Duterte memang kerap kali memerintahkan aparat kepolisian untuk tidak segan-segan membunuh para kriminal, khususnya para Bandar Narkoba. (Manila Times, 2016)

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Ronald "Bato" Dela Rosa yang juga sekaligus Kepala dari *Oplan Double Barrel*, mengungkapkan sebanyak 1.138 pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam operasi pemerintah *Oplan Double Barrel* terhitung sejak tanggal 1 Juli hingga 17 September 2016. Dalam laporannya, PNP juga berhasil menangkap 17,319 pecandu narkoba (Raymundo, 2016). Angka kematian para pengedar dan pengguna Narkoba dalam operasi *Oplan Double*

*Barre*terus bertambah, hingga mencapai angka 4000 di akhir bulan November 2016. (Philstar 2016)

Lebih lanjut, program ini disebut efektif mengurangi tingkat kriminalitas di beberapa provinsi, salah satunya di Provinsi Aklan. Tingkat kriminalitas di Provinsi Aklan dibandingkan tahun lalu, menurun hingga 15,5% terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Oktober 2016 diberlakukannya Oplan Double Barrel oleh Kepolisian Provinsi Aklan (APPO)(Villanueva, 2016). Pemerintah melakukan razia besar-besaran ke lebih dari 3 juta rumah warga, dan sebanyak 727.600 bandar narkoba serta 56,500 pengguna telah di tahan (Barehulak, 2016).

Ribuan warga sipil yang tewas dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan pasca Kebijakan War on Drug Duterte diberlakukan, membuat President Filipina ke-16 ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, Non-governmental Organization yang bergerak di bidang Kemanusiaan. Hal yang menjadi kritik terbesar adalah, setelah Oplan Double Barrel diberlakukan, muncul oknum-oknum yang turut melakukan pembunuhan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dilansir dari media internasional CNN, total korban tewas hingga Desember 2016 telah mencapai angka 5.927, sebanyak 2.086 tewas akibat Oplan Double Barrel oleh pemerintah. Sedangkan sisanya, 3.841 dibunuh oleh oknum lain. Selain itu, tidak adanya proses hukum yang dijalani para bandar dan pengguna Narkoba sebelum dieksekusi mati juga menjadi masalah di mata dunia internasional karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia. Ann Fordman, eksekutif direktor *International Drug*

Policy Consortium mengutarakan pendapatnya, bahwa tindakan kriminalitas, yang dalam hal ini pembunuhan tidak dapat dibenarkan sebagai upaya mengendalikan peredaran obat-obatan terlarang.

Human Rights Watch, Stop Aids and International HIV/AIDS Alliance, United Nation, dan 300 kelompok lainnya menandatangani *joint letters* yang ditujukan kepada *Internasional Narcotics Control Board* dan *UN Office on Drugs and Crime* yang berisi tuntutan menghentikan kebijakan tersebut. Phelim Kine, wakil direktur *Human Right Watch* untuk wilayah Asia, juga mengatakan hal yang sama, bahwa pembunuhan Bandar narkoba tanpa melalui proses hukum yang benar tidak dibenarkan untuk upaya pengendalian kriminalitas. Dan *International Drug Control* harus menegaskan Presiden Filipina tersebut tentang hal itu (NPR News, 2016).

Namun, mendapat begitu banyak kritikan tidak membuat Duterte menghentikan kebijakan dalam negerinya. Ia justru semakin gencar melanjutkan kebijakannya. Menurut Duterte, kejahatan narkoba telah menjadi momok masalah di Filipina dan jika tidak tegas dalam menanganinya hanya akan menghancurkan generasi muda Filipina. Perfecto Yasay, Menteri Luar Negeri Filipina, dalam Sidang Umum United Nation yang diselenggarakan di New York, 20-26 September 2016, mengatakan bahwa pemerintahan Duterte saat ini bertekad untuk membebaskan Filipina dari praktek korupsi dan hal lain yang merugikan negaranya termasuk peredaran dan penggunaan Narkoba. Dalam pertemuan rutin tersebut, Yasay kembali menegaskan pihak luar untuk tidak mengintervensi kebijakan politik negaranya serta

berbalik mendukung demi mencapai kepentingan nasionalnya. *“We urge everyone to allow us to deal with our domestic challenges in order to achieve our national goals without undue interference”* ujar Yasay dalam pidatonya (Brunnstorm, 2016).

Sekutu dekat Filipina, Amerika Serikat juga menyarankan Duterte untuk lebih memfokuskan perhatiannya kepada kemajuan ekonomi Filipina dan permasalahan Laut Cina Selatan. Namun, Duterte justru meolak tegas saran tersebut dan kembali menegaskan akan melanjutkan kebijakan War on Drugs-nya hingga akhir kepemimpinannya (Iyengar, 2016). Dikutip dari media internasional *Time*, Duterte mengatakan, *“This fight against drugs will continue to the last day of my term.”* Dalam wawancara eksklusif dengan media internasional Al Jazeera, Duterte mengungkapkan pendapatnya terkait kritikan yang didapatkannya atas kebijakan War on Drugs dari pihak luar, khususnya orang-orang Barat, *“..during my campaign, I said I would stop corruption. I will suppress drug, I will suppress crime and I am doing it. Why are the foreigners complaining? I did not promise them anything. I only promised the Filipino people..”*(AlJazeera, 2016).

Hingga sekarang, terlepas dari berbagai kritik dari internasional yang dilayangkan kepada Presiden Rodrigo Duterte dan sudah berapa ribu korban terduga bandar yang tewas, kebijakan *War on Drugs* dengan *Oplan Double Barrel* masih terus diberlakukan.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa Presiden Rodrigo Duterte terus melakukan kebijakan *War on Drugs* nya meskipun mendapat kecaman dari aktor internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Presiden Rodrigo Duterte terus melakukan kebijakan *War on Drugs*-nya meskipun mendapat kritik dan kecaman dari aktor internasional.

D. KERANGKA TEORITIK

Penulis menggunakan dua macam teori untuk mengetahui alasan mengapa Presiden Rodrigo Duterte terus melakukan kebijakan *War on Drugs* meskipun mendapat kritik dan kecaman dari aktor internasional. Dua teori itu yakni, teori pilihan rasional dan teori kedaulatan.

Teori Kedaulatan / Doktrin Sovereignty

Kedaulatan merupakan salah satu unsur yang membuat suatu negara dapat dikatakan negara yang di akui. Hal ini dikarenakan, kedaulatan erat hubungannya dengan kemerdekaan suatu bangsa. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi

untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan, yang tersedia. Negara yang berdaulat artinya negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya, atau hal ini disebut dengan internal sovereignty. Disamping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatannya, atau hal ini dapat disebut external sovereignty (Budiardjo, 2008). External sovereignty tidak hanya soal mempertahankan kemerdekaan, namun negara memiliki wewenang untuk menentukan kepada siapa mereka berinteraksi tanpa ada paksaan atau tekanan dari aktor internasional lain.

Keberadaan kedaulatan sangat penting bagi suatu negara karena tanpa adanya kedaulatan, negara sesuai dengan Perjanjian Westphalia, tidak dapat disebut sebagai negara. Adapun unsur-unsur sebuah negara yang dikemukakan, Miriam Budiardjo yakni, Wilayah, Penduduk, Pemerintah, dan Kedaulatan. Tanpa adanya kedaulatan, intervensi dari luar akan mudah berdatangan dan masuk ke dalam struktur pemerintahan domestik. Apabila ini terjadi, negara tersebut telah kehilangan kemerdekaannya dan menjadi negara yang terjajah. Karenanya, kedaulatan sangat penting bagi suatu negara dan seorang pemimpin negara beserta jajaran pemerintahannya harus dapat melindungi kedaulatan tersebut demi keberlangsungan negaranya.

Teori Kedaulatan merupakan doktrin hukum yang menyebutkan bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam mengatur urusan dalam negaranya. Kedaulatan negara membuat negara lain tidak berhak mencampuri urusan negara lain kecuali apabila negara tersebut tidak mampu mengatasi masalah negaranya dan masalah tersebut berdampak besar bagi kestabilan internasional. Otoritas negara untuk berinteraksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional, artinya, negara memiliki wewenang penuh dalam berhubungan dengan aktor lain, negara bebas memilih negara mana yang ingin mereka ajak bekerja sama tanpa ada tekanan ataupun intervensi dari negara lain.

Kedaulatan atau sovereignty berasal dari kata Latin *superanus* yang artinya terbatas. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara yang berdaulat dimaksudkan bahwa negara itu memiliki kekuasaan tertinggi. Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat berarti negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, negara memiliki monopoli kekuasaan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini memiliki batas-batasnya. Ada dua hal yang membatasi kekuasaan kedaulatan negara menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang pertama adalah terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan kedua, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Namun, terlepas dari kekuasaan yang terbatas tersebut, negara berdaulat memiliki kewenangan yang hakiki atas domisilinya, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Dalam kasus kebijakan War on Drug Presiden Rodrigo Duterte yang kontroversial, Filipina sebagai negara yang berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan apa yang terbaik bagi negaranya. Apalagi, masalah peredaran narkoba sudah sangat mengakar dan membahayakan kedaulatan negara Filipina itu sendiri. Doktrin kedaulatan juga memiliki aspek responsibility atau tanggung jawab yang mana negara harus bertanggung jawab untuk menegakkan kedaulatannya untuk melindungi warganya dan mencegah ancaman terhadap perdamaian dunia. Sejalan dengan ini, Duterte bersama pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara Filipina, yang dalam hal ini dengan memperlakukan kebijakan War on Drug meskipun kebijakan ini menuai kontroversi di lingkup global.

Teori Kedaulatan dan pentingnya peran kedaulatan bagi suatu negara, membuat keputusan Duterte untuk mengabaikan kritik dan kecaman dari aktor internasional serta terus melanjutkan meringkus ribuan Bandar narkoba dengan kebijakan War on Drug, adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Negara yang dalam hal ini Duterte memiliki otoritas tertinggi dalam negaranya untuk mengatur segala kebijakan domestik dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah peredaran narkoba yang sudah mengakar di Filipina demi kedaulatan negaranya.

Teori Pilihan Rasional

Setiap negara dalam membuat suatu kebijakan politik dalam maupun luar negeri berdasar pada kepentingan suatu negara tersebut. Suatu negara dapat dikatakan bertindak rasional apabila perilaku negara merupakan hasil perhitungan seksama tentang untung-rugi menurut sistem nilai yang dianut (Mas'ood, 1988). Dalam buku *Essence of Decision* karya Graham T. Allison, terdapat tiga model pembuatan keputusan yang salah satunya adalah model aktor rasional. Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit.

Pemerintah yang monolit yakni, pemimpin (*leader*) memiliki pengaruh dominan terhadap parlemennya. Rodrigo Duterte, sejak menjabat sebagai Walikota Kota Davao pada tahun 1988, merupakan sosok pemimpin kontroversial karena kebijakannya yang terbilang ekstrim dalam menyikapi permasalahan kriminalitas. Kebijakan yang ekstrim dan ketegasan Duterte dalam memberantas kriminalitas ini juga menjadi alasan betapa dicintainya Duterte oleh masyarakat Filipino. Kota Davao dibawah kepemimpinannya berhasil menjadi kota teraman di Filipina hingga saat ini, dengan berkurangnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Masyarakat kota Davao saat ini merasa sangat aman dan nyaman berjalan di siang dan malam hari tanpa perlu khawatir dengan orang-orang yang kemungkinan akan mencelakakan mereka. “Davao Death Squad” menjadi alasan menurunnya tingkat kriminalitas di kota Davao, dan operasi ini dimonitori langsung oleh Duterte.

Hal sama juga berlaku pada kebijakan War on Drugs pada masa kepresidenannya. Terlepas dari segala bentuk kritik dan ancaman dari aktor internasional, kebijakan Duterte tidak mendapat penolakan dari masyarakat Filipino. Dalam survey tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah yang dilakukan Pulse Asia Research Inc, sebuah badan survey nasional Filipina, Duterte berada di urutan pertama dengan 83%, meskipun nilai ini turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai angka 86%(Asia, 2016). Kepercayaan masyarakat dan pengaruhnya dalam parlemen membuat Duterte menjadi sosok yang kuat dalam pemerintahan. Keberhasilannya dalam memberantas kriminalitas, membuat masyarakat memilihnya sebagai Presiden ke-16 Filipina dengan harapan Duterte dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga Filipino.

Duterte terlahir di keluarga politik yang cukup aktif dan terpandang di Filipina, terutama di Provinsi Davao. Ayahnya, Vicente G. Duterte, merupakan seorang pengacara yang kemudian menjabat sebagai Walikota Davao yang sekarang bernama Davao. Ibunya, Soledad Roa, merupakan seorang guru sekolah sekaligus *civil leader*(Editors, 2016). Sejak kecil, Duterte memiliki watak yang keras, selama menempuh pendidikan di sekolah menengah keatas, Duterte dua kali mengalami DO karena perilakunya. Bukan perilaku nakal, melainkan Duterte senang bermain dengan anak-anak jalanan di kota dan preman kota, sambari menelaah dan meniru ucapan dan tingkah laku mereka. Hal ini membuat Duterte terkesan sebagai siswa yang nakal. Namun lingkungan yang pernah ia dekati ini sangat membantu dalam

menjalankan kebijakannya menghapuskan kriminalitas di kota Davao sebagai Walikota maupun sebagai Presiden.

Sebagai seorang politisi, Duterte dikenal sebagai sosok yang teguh pada pendiriannya, tidak mudah terbelokkan oleh pendapat pihak lain. Dibuktikan dengan sikap keras dan tegasnya terhadap pelaksanaan pemberantasan aksi kriminalitas, terutama narkoba. Meskipun banyak yang mengatakan kebijakannya tidak masuk akal dan terlalu ekstrem, Duterte yakin bahwa kebijakannya ini membawa pengaruh baik untuk negaranya dan terus melakukannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sering mengatakan sumpah serapah kepada kolega-koleganya apabila ia tidak setuju dengan maksud atau pendapat mereka. Ia pun mendapat julukan pemimpin yang kontroversial akibat sumpah serapah yang ia tunjukkan kepada United Nation, Amerika Serikat, dan pihak lainnya yang mencoba ikut campur tangan dalam masalah negaranya. Dalam menjalankan tugasnya, Duterte dikenal sebagai pemimpin yang “straight to the point” atau langsung tertuju pada intinya dan lebih banyak aksi ketimbang mengumbar obrolan janji. Dibuktikan lewat diresmikannya Project Double Barrel pada tanggal 1 Juli 2016 yang menjadi awal masa kepresidenannya.

Disamping karisma yang dimilikinya, sosok Duterte juga mendapat dukungan penuh dari warga Filipino terutama kaum perempuan karena kebijakan emansipasi wanita yang ia resmikan semasa menjadi Walikota Davao. Meskipun banyak pihak internasional dan bahkan dalam pemerintahan, pihak yang berseberangan dengan partai politiknya menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Duterte, namun

suara mereka tidak mempengaruhi kekuasaan Duterte. Filipina menganut sistem politik Demokrasi yang berarti *government by people* atau rakyat yang berkuasa (Budiardjo, 2008). Pihak politik manapun yang berusaha menurunkan atau menjatuhkan Duterte tidak akan berpengaruh besar terhadap posisinya saat ini, selama warga Filipino mendukung penuh Duterte sebagai pemimpin mereka.

Posisi Duterte sebagai Presiden dan pemimpin bagi masyarakat Filipino harus mengutamakan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Permasalahan narkoba yang sudah terlalu merusak masyarakat menjadi prioritas utamanya, Karena Maka dari itu unit analisa dari model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah dengan memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa (Mas'ood, 1988).

James B Rule dalam bukunya yang berjudul *Theory and Progress in Social Science* merumuskan tiga poin pokok tentang substansi dasar Teori Pilihan Rasional, yakni:

1. Tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah “instrument” (dalam artu: alat bantu), agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk manusia, atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarki preferensi ini relatif stabil.

2. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat mempengaruhi hasil dari perhitungannya.
3. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu diacak. (Budiardjo, 2008)

Untuk menjelaskan alasan dibalik suatu negara mengeluarkan atau memberlakukan kebijakan demi meraih kepentingan nasionalnya dengan semaksimal mungkin, penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional. Stephen M. Walt dalam jurnalnya yang berjudul “*Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies*” berpendapat bahwa Teori Pilihan Rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana individu (negara) membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan nasionalnya (Walt, 1999).

Dalam jurnalnya, Walt juga berpendapat bahwa:

1. *Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product or individual choices (or as the product of choices made by unitary actors).*
2. *Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its “subjective expected utility.” Given a particular set of preferences and fixed*

array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits.

3. *The specification of actors' preferences is subject to certain constraints: (a) an actor's preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C.)*(Walt, 1999)

Dari paparan diatas, Walt berpendapat bahwa, pertama Teori Pilihan Rasional bersifat individu, yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atau pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan).Walt menambahkan, aktor kesatuan yang dimaksudkan adalah negara. Kedua, teori pilihan rasional berasumsi bahwa aktor akan berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang membawa hasil maksimal terhadap kepentingannya.

Ketiga, teori pilihan rasional menspesifikan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, misalkan aktor memiliki beberapa pilihan, yang nantinya penulis dapat membentuk urutan peringkat dari preferensi untuk hasil yang berbeda. Selain itu, pilihan harus bersifat transitif (jika pilihan A lebih dinilai penting dibanding pilihan B dan C, maka aktor akan memilih A). Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana individu atau negara membuat keputusan, berdasarkan analisa *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya.

Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat Filipina lakukan terkait upayanya memberantas Narkoba dan kritik pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mereka dapatkan. Kebijakan War on Drug Duterte yang dimulai saat ia memulai kepemimpinannya pasca menang dalam Pemilu berhasil menjebloskan ribuan Bandar Narkoba ke dalam penjara dan juga menurunkan tingkat kriminalitas di Filipina. Meskipun mendapat banyak kritik dan kecaman dari internasional, kebijakan ini efektif mengurangi tingkat peredaran narkoba yang merupakan prioritas utama pemerintahan Duterte.

Pilihan Duterte untuk memutuskan mengabaikan semua kritik dan kecaman dari aktor internasional terkait kebijakannya juga merupakan pilihan yang rasional. Menimbang prioritas pemerintah Filipina untuk membebaskan negara dari Narkoba, kritik internasional yang meminta Duterte menghentikan kebijakan War on Drugs-nya dan mencari cara lain tidak menguntungkan Filipina. Kebijakan War on Drugs yang tengah berlangsung telah terbukti efektif dan apabila dihentikan justru merugikan Filipina.

Table 1 1Tabel Pilihan Rasional

Pilihan	Akibat
Duterte meneruskan kebijakan War on	Tingkat penyalahgunaan narkoba di Filipina menurun, dan Filipina terbebas

Drug terlepas dari kritik internasional	dari Narkoba
Duterte menghentikan kebijakan War on Drug karena kritik internasional	Permasalahan narkoba di Filipina akan terus berlanjut dan merusak negara

E. HIPOTESA PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah diajukan penulis diatas, keputusan Duterte **untuk tetap melanjutkan kebijakan War on Drugs meskipun mendapat kecaman secara internasional karena pemberantasan Narkoba merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Duterte.** Adapun hal-hal yang menyebabkan permasalahan Narkoba menjadi prioritas, yakni:

1. Permasalahan narkoba yang telah mengakar mengancam kedaulatan negara Filipina.
2. Opan Double Barrel efektif dalam menurunkan peredaran Narkoba di Filipina.

Dengan alasan-alasan tersebut, pemerintah Filipina memilih untuk tidak menghiraukan kritik dan protes yang berdatangan dari aktor internasional.

F. METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deksripsi analitik, dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka konseptual disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta satu dengan yang lainnya. Teknik pengumpulan data dengan library research yang menggunakan sumber data dari buku-buku referensi, artikel-artikel, jurnal, pencarian data internet, surat kabar, dan majalah-majalah.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Sejak masa kampanye Presiden hingga 6 bulan pertama masa kepresidenan Rodrigo Duterte, karena dalam setiap kampanyenya, Duterte berjanji kepada rakyat Filipino untuk memberantas tuntas masalah narkoba yang telah pelik di Filipina dalam 6 bulan pertama masa kepresidenannya.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pada Bab I adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II adalah pemaparan kebijakan dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah Filipina pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam pemberantasan Narkoba.

Pada Bab III, adalah pemaparan kritik dan kecaman dari aktor internasional, baik negara lain maupun organisasi internasional terhadap Kebijakan War on Drugs Duterte.

Pada Bab IV, adalah alasan mengapa Presiden Duterte tetap melanjutkan Kebijakan War on Drug meskipun mendapat kritik dan kecaman dari aktor Internasional.

Pada Bab V, adalah kesimpulan.